

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS

Bendri¹, Sujianto², Harapan Tua, R.F.S³

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: bendribensra@gmail.com

ABSTRAK

Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. yang kerap dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah Terbatasnya sumber daya manusia yang ahli/ terlatih mengakibatkan pengelolaan Barang Milik Daerah/BMD di Kabupaten Bengkalis tidak berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan ingin melihat kendala serta penyebab dalam mengelola sebuah barang milik daerah di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dengan metode riset yang digunakan yaitu turun kelapangan, melakukan sebuah wawancara dan dokumentasi dan kemudian teknik analisa yang digunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan di Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan sebuah barang milik daerah sudah berjalan dengan lancar tetapi masih ada hambatan- hambatan dalam melaksanakan sebuah pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Barang Milik Daerah, Kabupaten Bengkalis*

ABSTRACT

Regional Property must be managed properly and correctly so that transparent, efficient, accountable, economical Management of Regional Property is realized and guarantees certainty of value. The regional government of Bengkalis Regency often faces in the management of Regional Property (BMD) is the limited human resources. who are experts/trained have resulted in the management of Regional Property/BMD in Bengkalis Regency not running optimally. This study aims to look at the constraints and causes in managing a regional property in Bengkalis Regency, Riau Province with the research method used, namely field trips, conducting interviews and documentation and then used qualitative analysis techniques. The results of this study show that in Bengkalis Regency the management of regional property has been running smoothly but there are still obstacles in carrying out regional property management in Bengkalis Regency, Riau Province.

Keywords: *Management, Regional Property, Bengkalis Regency*

PENDAHULUAN

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. (Dessler, 2006)

Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola. Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Menurut (Baran, 2010) Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi

pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu

berupa Barang Milik Daerah (BMD), sehingga diperlukan suatu manajemen Pemerintahan daerah yang kredibel dan akuntabel agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan optimal. Salah satu bentuk kepercayaan dan pertanggung jawaban pemerintah Daerah kepada publik adalah pengelolaan atas Barang Milik Daerah (BMD). (Meidiana, Ni Putu Cahya Agung, Marheini, 2019)

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional pemerintahan. adapun kendala yang beberapa penyebab dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada maka dari itu tidak bisa terealisasi secara optimal dan maksimal.

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pengelolaan Barang Milik Daerah

(BMD) yang ditangani secara baik dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Bengkalis memiliki dasar hukum berupa (*Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*, n.d.) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, untuk menjaga aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Bengkalis maka perlu dilakukan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa pensertifikatan sebagai langkah tepat untuk menata aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Tanpa adanya acuan hukum dan banyaknya celah, aset tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil aset-aset daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen

Menurut (Monce, 2016)p Manajemen menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada manajemen ini lebih

husus kepada sebuah perencanaan untuk mengukur sebuah pengelolaan itu merupakan salah satu fungsi dari sebuah manajemen fungsi manajemen yang dikemukakan (Belch, George E. Belch, 2018) mengenai Prinsip-Prinsip Manajemen dalam (M. Manullang Dasar-dasar Manajemen), yang merumuskan fungsi-fungsi manajemen yang disingkat POAC yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*. Pengertian fungsi-fungsi dari manajemen Adalah:

- a. Perencanaan (*Planning*)
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)
- c. Pengarahan (*Actuating*)
- d. Pengawasan (*Controlling*)

Barang Milik Daerah (BMD)

Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksudkan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

Penelitian Terdahulu

Deissy Mokodompri, Jenny Morasa, Jessy Warongan Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu Penelitian Kualitatif Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa kendala dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu. Ada 4 faktor penghambat: (1) pengamanan dan pemeliharaan, (2) penilaian, (3) penghapusan, (4) kepatuhan. Perbedaan dengan hasil peneliti yaitu penelitian ini di laksanakan di kantor BKAD Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau penelitian ini membahas tentang pengelolaan barang Milik Daerah di Kabupaten Bengkalis dengan hasil penelitian dalam pengelolaan barang milik daerah di kabupaten bengklis sudah sesuai tetapi masih ada beberapa penyebab atau faktor penghambat nya yaitu komitmen dari pimpinan masih belum berjalan dengan efisien.

Priyono, K. (2013). El Muhasaba dengan judul Keandalan Informasi Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual: Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang. Metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sampang belum dilaksanakan secara memadai menurut PP No. 6 Tahun 2006. Berdasarkan penerapan asas-asas pengelolaan Barang Milik Daerah dan selanjutnya dikaitkan dengan karakteristik keandalan informasi, maka

disimpulkan bahwa penyajian informasi aset tetap daerah pada Pemerintah Kabupaten Sampang belum andal. Dalam penelitian ini, pengelolaan aset difokuskan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dan kemudian diukur tingkat keandalan informasi aset. perbedaan dengan hasil peneliti yaitu peneliti membahas mengenai kurang adanya penyesuaian pelaksanaan barang dengan ketentuan yang sudah ada dengan pengadaan barang yang masih kurang dengan kesesuaian dengan harga barang.

METODE

(Sugiyono, 2018) Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisis data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (Lexy.j & Moleong, 2007) Lokasi Penelitian di Kantor BKAD Kabupaten Bengkalis.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif merujuk kepada data kualitas objek penelitian atau serangkaian informasi verbal dan nonverbal untuk menggambarkan peristiwa yang menjadi fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti akan menggunakan Model Miles & Huberman. Model ini memiliki tahapan dalam pengumpulan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi, dimana dengan menggunakan analisis ini peneliti dapat menjelaskan dan menyampaikan secara konkrit gejala dan fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis data, peneliti akan menggunakan Model Miles & Huberman. Model ini memiliki tahapan dalam pengumpulan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi, dimana dengan menggunakan analisis ini peneliti dapat menjelaskan dan menyampaikan secara konkrit gejala dan fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya dalam penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Bengkalis

Menurut Dra. Hj. Liessuryani yang merupakan Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset Bidang Aset BPKAD Kabupaten Bengkalis menjelaskan yang merupakan Sekretaris BPKAD Kabupaten Bengkalis mengatans: *“Upaya pengamanan aset harus dilakukan BPKAD Kabupaten Bengkalis. Kita harus memaksimalkan*

ke-3 bentuk pengamanan itu. Agar pada saat sudah terjadi pencatatan tidak ada lagi pihak lain yang mengklaim Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Bengkalis”. (Wawancara pada Tanggal 25 September 2022).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pentingnya pengamanan barang agar tidak ada lagi penyerobotan, pengambil alihan atau klaim dari pihak lain atas kepemilikan aset PEMDA Kabupaten Bengkalis dengan melakukan pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Pelaksanaan pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Bengkalis telah melakukan pengamanan yang maksimal walaupun tidak melakukan pengamanan hukum akan tetapi Sekertaris Daerah telah menghimbau untuk menggunakan ketiga jenis pengamanan agar lebih efektif dan efisien agar tidak ada lagi klaim kepemilikan dari pihak ketiga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Bengkalis

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Agusfian, SE.Sy yang merupakan Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan & Perencanaan Pemeliharaan Bidang Aset BPKAD Kabupaten Bengkalis menjelaskan: *“Pada dasarnya kendalanya itu dari manusianya, karena kurangnya kesadaran mengenai apa sebenarnya arti atau kegunaan dari Barang Milik Daerah (BMD) itu dan disini masih*

erat dengan hubungan kekeluargaan. Apalagi sekarang baru saja terjadi perubahan struktur organisasi. Terutama Kabid. aset itu masih baru disini dan masih perlu menyesuaikan diri, dimana yang menjadi kendala itu ketika pejabat yang baru ini tidak mengetahui pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki Pemerintah Daerah".(Wawancara tDari uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor SDM merupakan suatu kendala dalam pengelolaan sebuah Barang Milik Daerah (BMD) Daerah, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran SDM mengenai arti dari kegunaan Barang Milik Daerah (BMD) itu sendiri. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 21 Agustus 2022).

Tabel 1. Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Bengkalis

No	Sub Unit	Jumlah
1	Sekretariat	9
2	Bidang Anggran	5
3	Bidang Perbendaharaan	12
4	Bidang Akutansi dan Pelaporan	2
5	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	6
6	Unit Pelaksana Teknis Badan	-
Jumlah		34

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Bengkalis 2021

2. Faktor Sarana, Prasarana dan Proses

Menurut Dra. Hj. Liessuryani yang merupakan Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset Bidang Aset BPKAD Kabupaten Bengkalis menjelaskan: "*Strategi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui SAP berbasis akrual lebih banyak dilakukan dengan pendekatan spiritual, tetapi secara teknis dan kebijakan secara umum juga sudah dibuatkan dengan kreatifitas sendiri yang disesuaikan dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya.*" (Wawancara tanggal 08 September 2022).

Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini memuat hal-hal sebagai berikut: ketentuan umum, penyusunan anggaran kinerja, pengelolaan keuangan daerah, administrasi pengelolaan barang daerah, standar biaya konsumsi dan perjalanan daerah, pembinaan aparatur dan pedoman penyelenggaraan diklat, pedoman pelaksanaan kegiatan/pengadaan barang/jasa, pedoman umum penyelenggaraan pembangunan bangunan negara/daerah beserta lingkungannya, pedoman penyelenggaraan penyusunan rencana tata ruang, sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

3. Faktor Komitmen Pimpinan

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPK Kabupaten Bengkalis menekankan bahwa selain komitmen pimpinan juga diperlukan adanya satu komando dalam pelaksanaan semua kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Idris, SE yang merupakan Kabid. Pengelolaan Aset BPKAD Kabupaten Bengkalis mengatakan: “Yang menjadi kendala yang ke dua itu Komitmen pemimpin. Kenapa saya katakan seperti itu karena hampir tiap tahun diadakan pergantian pejabat. Kalau menurut saya jangan keseringan diganti karena belum tentu pemimpin yang baru mampu menjalankan tugasnya. Sehingga jangan sampai menghambat jalannya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)”. (Wawancara Tanggal 12 September 2022).

Bahwa pimpinan yang taat terhadap peraturan-peraturan atau undang-undang sudah di sahkan oleh presiden, karena apabila tidak mematuhi hal tersebut sebagaimana sebagai bawahan akan otomatis mengikuti pimpinan, maka dari itu sebuah komitmen seorang pimpinan sangat di butuhkan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas hasil peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bengkalis yaitu dengan

sudah berjalannya badan pengelolaan barang milik daerah tetapi masih belum terlalu maksimal masih ada faktor- faktor yang belum terealisasi dengan baik. Tetapi dari keseluruhan sudah optimal. Ada beberapa saran: sebaiknya dari pengelolaan barang milik daerah lebih bersifat subjektif dan terbuka dalam pembuatan laporan maupun penyusunan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Baran. (2010). *Teori Komunikasi Massa : Dasar, Pergelakan dan Masa Depan (edisi kelima) (Afrianto Daud & Putri Iva Izzati, penerjemah). Jakarta : Salemba Humanika.*
- Belch, George E. Belch, M. A. (2018). *Advertising and Promotion : An Integrated Marketing Communications Perspective, McGraw-Hill Education, New York.*
- Dessler, G. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia (P. Mollan Benyamin (Ed.); jilid 2).*
- Lexy, j, & Moleong. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.*
- Meidiana, Ni Putu Cahya Agung, Marheini, A. A. I. . (2019). *Path Analysis Path Analysis. Pengaruh Kepemilikan Aset, Ketersediaan Infrastruktur Dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin, 24(1), 54–69.*

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 9, Nomor 1, Februari 2023

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

(59-67)

- Monce, B. (2016). Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor SAR Sorong. *JURNAL RISET BISNIS DAN MANAJEMEN*, 4(1), 1–16.
- peraturan daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah.* (n.d.).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D Edisi Kedua.* Alfabeta.